

**DISERTASI**

**PERLINDUNGAN HAK UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT  
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA  
PENGHINAAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**OLEH:**

**SRY WAHYUNI**

**NIM.1930112005**



**Dosen Pembimbing:**

- 1. Prof. Elwi Danil , SH, MH**
- 2. Prof. Aria Zurnetti, SH, MH**
- 3. Dr. Yoserwan, SH, MH, LLM**

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**PERLINDUNGAN HAK UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT MELALUI  
MEDIA SOSIAL DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**  
(Sry Wahyuni, 1930113005, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Univeristas Andalas, 365 Halaman, 2025)

**ABSTRAK**

Undang-undang sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum atas setiap tindakan atau transaksi di ruang maya. Namun, seiring berjalannya waktu dalam implementasi Undang-undang tersebut banyak menuai kritik dan kontroversi karena dianggap sebagai tameng dan tangan besi penguasa untuk membungkam kebebasan berpendapat masyarakat terutama di ruang maya atau media sosial. Selain itu kriminalisasi perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik juga dijadikan senjata yang mematikan untuk membungkam pendapat-pendapat tajam yang mengkritisi penguasa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A UU ITE berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan institusi/orang yang bersangkutan. Kenyataannya UU ITE dianggap tidak sempurna karena tidak bisa menjelaskan rujukan dari pasal dalam KUHP. Untuk itu penelitian ini ingin mengkaji bagaimana pengaturan hak menyampaikan pendapat melalui media sosial, bagaimana penerapan perlindungan hak menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam tindak pidana penghinaan dan bagaimana konsep perlindungan hak menyampaikan pendapat dalam tindak pidana penghinaan yang ideal dalam mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan; (1) Pengaturan hak menyampaikan pendapat di media sosial terkait tindak pidana penghinaan sudah ada dan sudah diberlakukan namun belum sepenuhnya terlindungi (2) penerapan perlindungan hak menyampaikan pendapat dalam tindak pidana penghinaan sudah ada akan tetapi belum memenuhi rasa keadilan menerapkan pasal-pasal yang mengandung sanksi Hukum Pidana Hukum ITE harus menjadi lembaga penegak hukum dapat memperhatikan meluasnya penggunaan pasal pidana Itu tidak dijadikan instrumen dalam UU ITE mengkriminalkan seseorang. Untuk kepastian hukum dan menghindari kriminalisasi berlebihan atas pencemaran nama baik atau tindak pidana penghinaan (3) Konsep menyampaikan pendapat dalam tindak pidana penghinaan ini mewujudkan dan melindungi kebebasan berpendapat bahwa kebenaran harus disesuaikan dengan pengaturan yang sistematis dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Idealnya mampu menciptakan ekosistem yang tertib.

Kata Kunci: Perlindungan hak menyampaikan pendapat, tindak pidana penghinaan.

***PROTECTION OF THE FREEDOM TO EXPRESS ONESELF USING SOCIAL MEDIA IN THE CONTEXT OF A DEFAMATION OFFENSE UNDER INDONESIAN CRIMINAL LAW***

**(Sry Wahyuni, 1930112005, Law Doktoral Program, Faculty Of law Andalas University , Page 365, 2025)**

***ABSTRACT***

The law is an effort to prevent and control crime as well as provide legal certainty for every action or transaction in cyberspace. However, over time the implementation of this law has attracted a lot of criticism and controversy because it is considered a shield and iron hand for the authorities to silence people's freedom of opinion, especially in cyberspace or social media. Apart from that, the criminalization of acts of insult/defamation is also used as a deadly weapon to silence sharp opinions that criticize the authorities. As intended in Article 27 A of the ITE Law, it seeks to provide protection for the rights of individuals and institutions, where the use of any information via the media involving personal data of a person or institution must be done with the approval of the institution/person concerned. In fact, the ITE Law is considered imperfect because it cannot explain references to articles in the Criminal Code. For this reason, this research wants to examine how the right to express opinions via social media is regulated, how the protection of the right to express opinions via social media is implemented in criminal acts of insult and how the concept of protecting the right to express opinions in criminal acts of insult is ideal in realizing legal certainty. This research is normative legal research, and is prescriptive in nature. The results of this research show; (1) Regulations on the right to express opinions on social media regarding criminal acts of insulting already exist and have been enforced but are not yet fully protected (2) The application of protection for the right to express opinions in criminal acts of insulting already exists but does not yet fulfill a sense of justice implementing articles containing legal sanctions Criminal ITE Law must be a law enforcement agency that can pay attention to the widespread use of criminal articles. It is not used as an instrument in the ITE Law to criminalize someone. For legal certainty and to avoid excessive criminalization of defamation or criminal acts of insult (3) The concept of expressing opinions in criminal acts of insult embodies and protects freedom of opinion, that truth must be adapted to systematic arrangements and comprehensive laws and regulations. Ideally, it is able to create an orderly ecosystem.

**Key Word:** Protection of the right to express opinions, criminal acts of insult.